

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era setelah Perang Dingin, isu lingkungan menjadi topik yang sering dibahas di tingkat global. Banyak negara mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang. Kesadaran terhadap lingkungan semakin meningkat, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah, terutama dengan memburuknya kualitas lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, suhu bumi yang terus meningkat dan berbagai penyakit akibat kerusakan lapisan ozon. Hal ini mendorong isu lingkungan menjadi salah satu agenda penting di tingkat internasional. Kesadaran global ini semakin ditegaskan melalui pertemuan internasional yang mulai membahas isu lingkungan secara sistematis, seperti Konferensi Stockholm 1972 (Rudy, 2011).

Isu lingkungan mulai mendapat perhatian pada tahun 1972 melalui Konferensi Lingkungan Hidup Manusia yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Stockholm. Dalam konferensi ini, untuk pertama kalinya hubungan antara pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan menjadi topik di tingkat internasional.

Masalah lingkungan dianggap sebagai isu lintas batas karena beberapa alasan, seperti:

- a. Sumber daya alam tidak hanya terbatas di satu negara, tetapi bergerak melintasi wilayah.
- b. Kegiatan di lingkungan laut, seperti pengiriman barang, pertambangan, dan migrasi spesies asing, dapat berdampak pada banyak negara.

Salah satu masalah lintas batas yang paling mendesak adalah pencemaran laut, yang menjadi perhatian utama di kawasan seperti Pasifik Selatan. Kemajuan teknologi, eksploitasi alam, dan industrialisasi yang besar telah menyebabkan krisis lingkungan global. Saat ini, dunia menghadapi masalah serius seperti polusi udara, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, pemanasan global, polusi tanah, polusi laut, dan ledakan penduduk (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1972)

Pencemaran laut merupakan masalah global yang berdampak serius terhadap ekosistem laut, kehidupan manusia, dan ekonomi, terutama di negara-negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 pengertian pencemaran laut dapat didefinisikan sebagai "masuknya zat atau energi oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, ke dalam lingkungan laut, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek yang merugikan seperti kerusakan pada sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, penghalang terhadap aktivitas laut, termasuk perikanan dan penggunaan laut lainnya yang sah, serta pengurangan kualitas air laut dan penurunan daya tarik lingkungan." Sebagai salah satu wilayah yang kaya akan

keanekaragaman hayati laut, kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap dampak pencemaran laut ini (UNCLIOUS 1982). Lingkungan laut merupakan masalah ini penting bagi Negara-negara Kepulauan Pasifik, tak terkecuali Kawasan Pasifik Selatan karena hal ini dapat merusak sumber daya alam mereka yang akan berdampak terhadap negara negara yang ada di Kawasan tersebut. Kawasan Perairan Pasifik Selatan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies laut endemik, termasuk terumbu karang, ikan, dan mamalia laut seperti paus serta lumba-lumba. Selain itu, kawasan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perairan ini menghadapi ancaman serius berupa pencemaran laut yang berasal dari berbagai sumber. Limbah plastik menjadi salah satu kontributor utama pencemaran di kawasan ini. Plastik yang sulit terurai secara alami mengakibatkan akumulasi sampah di perairan, bahkan membentuk zona konsentrasi seperti *Great Pacific Garbage Patch*. (Kumar, 2020).

Selain limbah plastik, pencemaran minyak dari aktivitas transportasi laut dan eksplorasi energi juga menjadi ancaman besar. Tumpahan minyak tidak hanya merusak jaringan terumbu karang tetapi juga membunuh plankton dan meracuni biota laut lainnya. Dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang, karena ekosistem yang terkena pencemaran

minyak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Sumber pencemaran lainnya adalah limbah kimia yang berasal dari aktivitas industri. Limbah ini sering mengandung logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang mencemari perairan. (Weis, 2015).

Lautan Pasifik, termasuk kawasan Pasifik Selatan, menghadapi berbagai masalah pencemaran laut yang signifikan, seperti pencemaran plastik, minyak, dan limbah industri. Sampah plastik yang terbawa arus laut sering kali mencemari pulau-pulau kecil, mengancam kehidupan laut, dan berdampak pada kesehatan serta ekonomi masyarakat pesisir. Kasus tumpahan minyak di perairan Timor Leste pada tahun 2009, misalnya, menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengurangi hasil tangkapan nelayan, memperlihatkan pentingnya penanggulangan pencemaran minyak. Di Papua Nugini, limbah dari kegiatan pertambangan mencemari perairan dan memicu konflik antara perusahaan dan komunitas lokal. Fiji juga menghadapi krisis pencemaran laut yang merusak terumbu karang dan mengancam sektor pariwisata serta kesehatan masyarakat. Masalah-masalah ini menunjukkan dampak luas pencemaran laut pada ekosistem, ekonomi, dan stabilitas sosial, sehingga membutuhkan kerja sama regional, termasuk antara Indonesia dan Australia, untuk mengatasi pencemaran dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan Pasifik Selatan.

Fokus masalah pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kawasan ini merupakan salah satu

wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan iklim global. Secara geografis, Pasifik Selatan mencakup sejumlah negara kepulauan kecil, seperti Kiribati, Tuvalu, Fiji, dan Papua Nugini, yang memiliki perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam laut. Negara-negara ini sangat bergantung pada ekosistem laut untuk kehidupan mereka, baik dari segi ketahanan pangan maupun ekonomi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis alam. Oleh karena itu, pencemaran laut di kawasan ini memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi ekosistem itu sendiri maupun bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam konteks geografis dan lingkungan, kawasan Pasifik Selatan juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang memperburuk masalah pencemaran laut. Peningkatan suhu laut dan perubahan pola cuaca dapat memperburuk dampak dari pencemaran tersebut, merusak terumbu karang yang sudah terancam dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas pada ekosistem laut yang sangat bergantung pada keseimbangan suhu dan kualitas air laut.

Dampak pencemaran laut ini sangat merugikan ekosistem di kawasan Pasifik Selatan. Kerusakan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup berbagai spesies laut. Penurunan populasi biota laut akibat gangguan pada rantai makanan dan keracunan limbah mengancam

keseimbangan ekosistem. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekosistem laut tetapi juga memengaruhi kehidupan manusia, terutama masyarakat pesisir. Di sisi lain, degradasi lingkungan laut juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama di wilayah yang bergantung pada keindahan alam bawah laut sebagai daya tarik utama. Dampak dari segala aktivitas manusia tersebut termasuk pencemaran plastik, bahan kimia, serta dampak perubahan iklim, telah mengancam kelestarian lingkungan laut di wilayah ini. Oleh karena itu, kerja sama internasional, baik di tingkat regional maupun global, menjadi sangat penting untuk melindungi ekosistem laut.

Ekosistem laut di Pasifik Selatan sangat penting bagi negara-negara kepulauan setempat dan tetangganya, seperti Indonesia dan Australia. Kerusakan habitat laut dapat mengurangi kemampuan penyerapan karbon dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran laut di kawasan ini, terutama oleh limbah plastik dan tumpahan minyak, merusak lingkungan dan masyarakat pesisir. Mikroplastik dapat mengancam ekosistem laut dengan masuk ke rantai makanan, sementara tumpahan minyak merusak habitat penting. Dampak pencemaran ini juga menyebar ke wilayah lain melalui arus laut, menciptakan masalah lingkungan global. Oleh karena itu, menjaga kelestarian ekosistem laut di Pasifik Selatan menjadi sangat mendesak (Parker, 2018).

Sebagai bagian dari upaya ini kerja sama internasional memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan lingkungan laut karena lautan adalah ekosistem global yang tidak mengenal batas-batas politik. Dengan terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mencerminkan kepekaan dua negara ini terhadap keberlangsungan permasalahan lingkungan laut yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Dalam hal ini masalah global yang dimaksud adalah pencemaran di lautan yang tidak mengenal batas negara. Zat-zat seperti tumpahan minyak, plastik, dan limbah kimia dapat dengan mudah tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain melalui arus laut. Ini berarti bahwa pencemaran laut yang dimulai di satu negara dapat mempengaruhi negara-negara lain, baik yang berdekatan maupun yang jauh. Sebagai dua negara besar di kawasan, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan strategis untuk bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Selatan Pasifik (Santos, 2022).

Signifikansi hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek khususnya lingkungan maritim yang krusial bagi kedua negara tersebut. Kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa, meskipun pada awalnya dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang dipenuhi oleh rasa tidak percaya. Dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 1987, dinyatakan bahwa kedekatan geografis Indonesia dipandang sebagai potensi ancaman bagi keamanan

Australia, yang dapat datang "dari atau melalui" Indonesia. Kedua negara ini mulai menyadari pentingnya kolaborasi di bidang maritim untuk kepentingan bersama. Pada awalnya, kerjasama ini berfokus pada pengaturan batas laut dan pemanfaatan sumber daya maritim. Namun, pada tanggal 26 Februari 2017 di Sydney, Australia Telah diadakan sebuah deklarasi. menunjukkan komitmen Indonesia dan Australia untuk membangun visi maritim yang sama. Kerjasama ini tidak hanya difokuskan pada batas laut dan pemanfaatan sumber daya saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek maritim lainnya seperti keamanan, keselamatan, dan lingkungan laut (Evan A Laksamana, 2018).

Indonesia dan Australia memiliki posisi strategis dalam kawasan Pasifik Selatan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut. Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan sebagai pusat keanekaragaman hayati laut, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Sementara itu, Australia, sebagai salah satu negara maju di kawasan ini, memiliki kapasitas teknologi dan finansial yang dapat mendukung upaya mitigasi pencemaran laut. Peran strategis kedua negara ini tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di kawasan Pasifik Selatan, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan dalam konteks lingkungan global. Oleh karena itu kedua negara ini, tentunya memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanggulangan pencemaran laut yang terjadi Kawasan pasifik, tak

terkecuali Kawasan Pasifik Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “Peran Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Dalam Penanggulangan Pencemaran Laut Di Perairan Kawasan Pasifik Selatan. Judul ini dipilih karena isu pencemaran laut merupakan masalah global yang semakin mendesak, terutama di kawasan perairan Selatan Pasifik yang strategis dan kaya akan sumber daya laut. Indonesia dan Australia, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Melalui kerja sama kedua negara Indonesia dan Australia dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan kerja sama internasional yang bertujuan untuk menanggulangi pencemaran laut, baik yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran, tumpahan minyak, limbah plastik, maupun faktor lainnya. Oleh karena itu kerja sama ini menjadi penting karena perairan di kawasan Pasifik Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk, sekaligus merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia. Dengan adanya sinergi antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi ekosistem laut, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kelestarian sumber daya laut.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan ini akan berfokus pada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam konteks penanggulangan pencemaran laut. Kerja sama dengan negara lainya tidak menjadi fokus utama. Wilayah yang menjadi perhatian adalah perairan kawasan Pasifik Selatan yang relevan dengan kerja sama antara Indonesia dan Australia. Kedua pembahasan ini tidak dapat dipisahkan sebab Indonesia dan Australia berada di Kawasan Pasifik. Pembahasan selanjutnya berfokus pada upaya penanggulangan pencemaran laut, terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti tumpahan minyak, limbah plastik, atau polusi industri.

Selain itu, penulis akan membatasi penelitian Studi ini membahas kerja sama Indonesia dan Australia yang berlangsung dalam kurun waktu 2015– 2024, mencakup inisiatif, kebijakan, dan implementasi selama periode tersebut. Informasi di luar rentang waktu ini hanya disertakan sebagai konteks pendukung. Alasan peneliti memilih rentan waktu tersebut dikarenakan rentan waktu ini menandai fase implementasi kerja sama antara Indonesia dan Australia telah terjalin dalam penanggulangan pencemaran laut. Agar hal ini mempermudah, berikut merupakan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti.

Dengan dasar ini pula penulis dapat merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan?
2. Bagaimana Dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam mengatasi pencemaran laut di perairan Kawasan Pasifik selatan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi pencemaran laut di perairan kawasan Pasifik Selatan.
- b. Untuk mengetahui dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam mengatasi pencemaran laut di perairan Kawasan Pasifik Selatan.

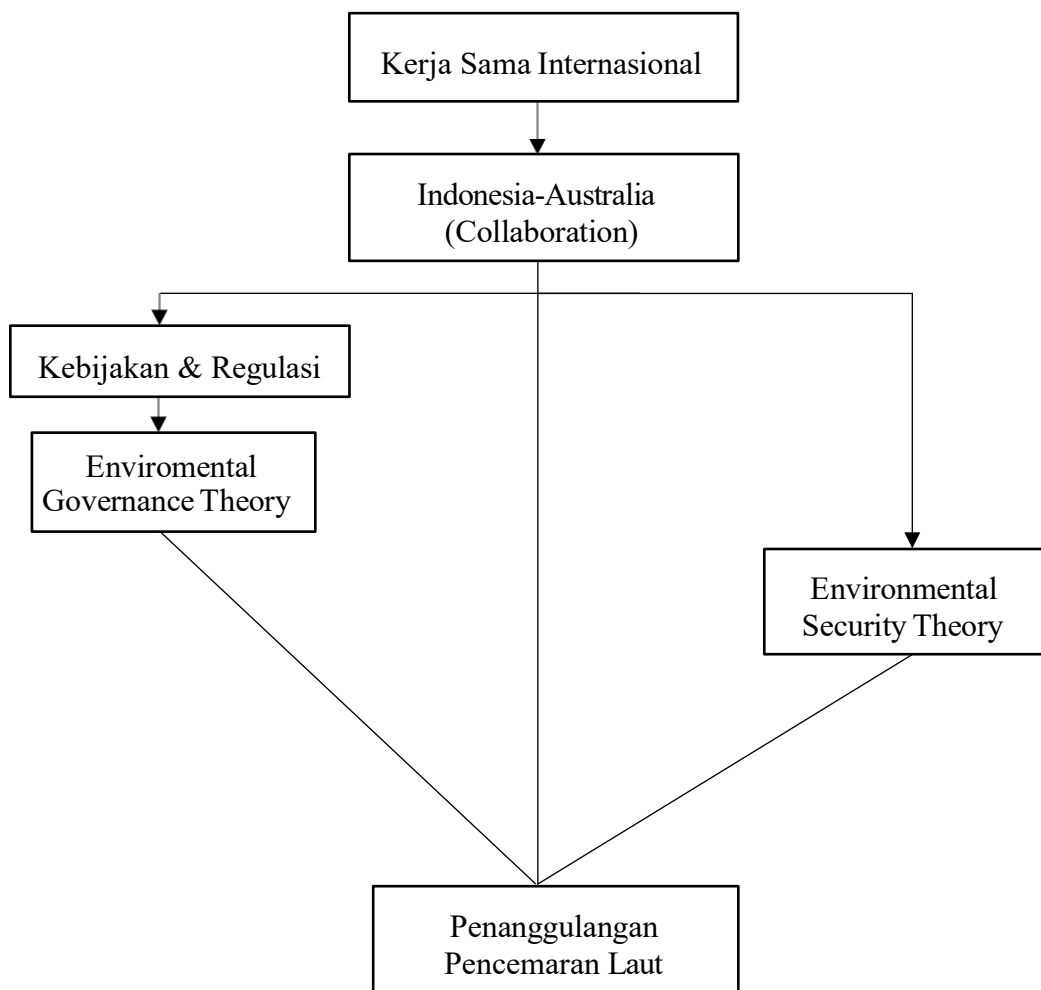
#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Indonesia dan Australia bekerja sama dalam lingkup internasional untuk mengatasi masalah pencemaran laut.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional kedepannya terhadap pencemaran lingkungan di kawasan Pasifik Selatan
- c. Diharapkan dengan penelitian dapat memberikan informasi dan menjadi bahan bacaan para mahasiswa khususnya studi Ilmu Hubungan Internasional.

#### D. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional



Berdasarkan bagan kerangka konsep penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis didasarkan pada tiga konsep utama Kerja Sama Internasional, Environmental Security, dan Environmental Governance Theory. Kerja Sama Internasional menjadi landasan bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam menangani pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan. Melalui kerja sama ini, kedua negara berupaya untuk menciptakan sinergi dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan bersama, dan transfer teknologi. Kerja sama ini bertujuan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara individual oleh satu negara saja.

Environmental Security (Keamanan Lingkungan) selain menjadi salah satu konsep, juga menjadi tujuan akhir dari kerja sama ini, yang berfokus pada perlindungan dan keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Pasifik Selatan. Dalam konteks ini, keamanan lingkungan tidak hanya mencakup pengendalian pencemaran, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya laut tetap tersedia dan berfungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem lainnya.

Penulis juga akan menggunakan konsep Environmental Governance Theory melengkapi kerangka ini dengan memberikan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya aturan dan regulasi, teknologi yang mendukung keberlanjutan, serta pelibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan lingkungan. Dalam penerapannya, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia

mencakup beberapa elemen penting, seperti pembentukan kebijakan dan regulasi bersama, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pendanaan untuk mendukung program mitigasi pencemaran laut. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya partisipasi multi-aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam upaya kolaboratif untuk menangani pencemaran laut.

Melalui pendekatan ini, kerja sama antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat menghasilkan penanggulangan pencemaran laut yang efektif. Hasil yang diharapkan mencakup pengurangan tingkat pencemaran, pemulihan ekosistem laut, dan perlindungan sumber daya laut untuk keberlanjutan di masa depan. Dengan mengintegrasikan tiga konsep utama ini, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan pencemaran laut bergantung pada sinergi antara hubungan bilateral yang kuat, penerapan mekanisme pengelolaan lingkungan yang efektif, serta pencapaian keamanan lingkungan sebagai tujuan akhir. Adapun pemaparan spesifik dari kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Kerja Sama Internasional (International Cooperation)**

Konsep kerja sama internasional telah menjadi bagian penting dari penelitian hubungan internasional selama beberapa dekade terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori interdependensi, yang berperan besar dalam

perkembangan studi ini. Tanpa Teori interdependensi ini, penelitian tentang kerja sama internasional tidak akan berkembang sejauh ini, apalagi mencapai bentuknya di abad ke-21(Dai, 2010)

Joseph Nye dan Robert Keohane (1970) dalam bukunya yang berjudul *Power and Interdependence: World Politics in Transition*" menegaskan bahwa kerja sama internasional menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan di antara negara-negara akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi. Dalam dunia yang saling terhubung ini, tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun dalam menangani masalah global seperti perubahan iklim. Hubungan antarnegara tidak lagi terbatas pada isu politik dan keamanan, tetapi meluas ke bidang-bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan budaya, melibatkan yang tentunya aktor negara dan dan tak jarang melibatkan aktor non-negara Secara historis, pendekatan ini dikembangkan dari konsep *interdependence* (ketergantungan timbal balik) yang merupakan salah satu konsep liberalisme dalam kerja sama Internasional (Joseph Nye, 1977).

Dalam kaitanya kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan mencerminkan saling ketergantungan kedua negara. Isu

pencemaran laut merupakan masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga memerlukan kolaborasi internasional. Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia berada dalam hubungan saling ketergantungan karena dampak pencemaran laut, seperti kerusakan ekosistem dan berkurangnya sumber daya laut, memengaruhi kesejahteraan kedua negara. Hubungan ini sesuai dengan gagasan Nye dan Keohane bahwa kerja sama internasional sering kali didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan global yang saling memengaruhi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk mengatasi tantangan global. Dalam konteks Indonesia dan Australia, perjanjian atau program bersama mencerminkan prinsip-prinsip interdependence complex, yakni hubungan yang saling menguntungkan, multidimensi (melibatkan isu lingkungan, ekonomi, dan politik), serta perlunya menghindari dampak negatif dari konflik atau ketidakseimbangan kepentingan. Negara-negara terlibat dalam organisasi internasional berdasarkan tujuan bersama, yang dicapai melalui kepercayaan, komitmen, dan nilai-nilai bersama.

Dengan demikian, negara-negara tidak memandang keuntungan mereka hanya dalam konteks perbandingan dengan negara lain, tetapi lebih pada keuntungan total yang dapat

diperoleh melalui kerja sama. Artinya, dengan bekerja sama, negaranegara bisa mencapai hasil yang lebih baik bersama-sama, alih-alih hanya berfokus pada keuntungan individu atau perbandingan dengan negara lain. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan internasional bisa dilihat sebagai situasi "interaksi positif-jumlah", yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam kerja sama bisa mendapatkan manfaat. Tidak ada yang kalah atau merugi; justru, setiap negara memperoleh keuntungan dari kolaborasi tersebut, dan secara keseluruhan, hasilnya lebih menguntungkan daripada jika mereka bertindak sendiri-sendiri. (Keohane,1998)

Selain itu, Joseph Nye juga mempopulerkan konsep soft power. konsep soft power juga memperlihatkan pentingnya daya tarik non-paksa, seperti diplomasi lingkungan, transfer teknologi ramah lingkungan, dan edukasi lintas negara, untuk menciptakan hubungan saling percaya dan komitmen bersama. Melalui pendekatan ini, kerja sama internasional tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan bersama, tetapi juga memperkuat hubungan antarnegara berdasarkan nilai dan norma global yang mengedepankan kolaborasi (Nye,2011).

Pada gilirannya, kerja sama internasional dalam konteks Indonesia dan Australia berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut. Indonesia, sebagai negara dengan kawasan laut yang luas,

memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, sementara Australia, dengan sumber daya teknologi dan risetnya, dapat membantu Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan. Kerja sama ini melibatkan tindakan terkoordinasi untuk meminimalkan konflik dan memaksimalkan keuntungan melalui perjanjian atau hubungan saling menguntungkan. Dengan demikian, kerja sama internasional bertujuan untuk mengelola perbedaan guna mencapai stabilitas dan kesejahteraan global, serta menciptakan manfaat bersama yang lebih besar daripada jika negara-negara bertindak sendiri-sendiri.

## **2. Teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security Theory)**

Konsep keamanan lingkungan muncul dari gerakan peduli lingkungan dan perubahan dalam strategi keamanan setelah berakhirnya Perang Dingin. Interpretasi paling utama dari konsep ini mencakup bagaimana perubahan lingkungan dapat mengancam keamanan nasional, bagaimana ia bisa menjadi faktor pemicu konflik kekerasan, dan bagaimana perubahan lingkungan berisiko terhadap keamanan manusia. Bagi banyak negara, perubahan lingkungan dianggap sebagai isu keamanan nasional, meskipun berbeda dengan ancaman tradisional seperti invasi bersenjata. Meskipun pengaruhnya kecil dalam memicu konflik kekerasan, perubahan lingkungan dapat memengaruhi

distribusi dan kualitas sumber daya yang bergantung pada masyarakat miskin, sehingga menjadi isu keamanan manusia. Sebagian besar, keamanan lingkungan dipahami sebagai ancaman bagi negara-bangsa, bukan terhadap lingkungan itu sendiri, negara lain, atau individu. (J. Barnett 2009).

Dalam bukunya *People, States, and Fear* (1991), Barry Buzan menawarkan analisis yang lebih luas tentang konsep keamanan, melampaui pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada ancaman militer. Buzan mengusulkan bahwa keamanan harus dipahami sebagai fenomena multidimensi yang mencakup berbagai sektor. Salah satu dimensi utama yang ia identifikasi adalah keamanan lingkungan. Dalam perkembangannya pemikiran Barry Buzan tentang keamanan lingkungan mendorong perubahan cara pandang dalam studi hubungan internasional dan kebijakan keamanan.

Barry Buzan menjelaskan bahwa keamanan lingkungan merupakan salah satu sektor penting dalam analisis keamanan multidimensi. Keamanan lingkungan tidak hanya terkait dengan ancaman langsung terhadap ekosistem, tetapi juga dengan dampaknya terhadap stabilitas manusia dan negara. Menurut Buzan, degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pencemaran dapat menjadi sumber ketidakstabilan yang signifikan, memicu

konflik antarnegara, ketegangan sosial, migrasi paksa, dan krisis kemanusiaan.

Selain itu, Buzan juga menekankan bahwa keamanan lingkungan harus dilihat sebagai bagian integral dari keamanan manusia secara keseluruhan. Ancaman terhadap lingkungan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan militer atau keamanan tradisional, melainkan memerlukan kerja sama internasional, kebijakan yang komprehensif, dan perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi bahwa isu-isu seperti kelangkaan sumber daya alam, polusi lintas batas, dan kehancuran habitat adalah tantangan global yang memerlukan respons kolektif di tingkat regional dan internasional. Pemikiran Buzan tentang keamanan lingkungan mendorong perluasan cakupan analisis keamanan dalam studi hubungan internasional. Ia membuka ruang bagi pemahaman bahwa ancaman terhadap keamanan global tidak hanya berasal dari konflik bersenjata tetapi juga dari tantangan non-tradisional, seperti kerusakan lingkungan, yang berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan hidup manusia dan planet ini.

Secara garis besar dalam praktiknya, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat (1996), keamanan lingkungan mencakup berbagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan demi mendukung stabilitas dan keamanan

nasional. Hal ini tidak lepas dari langkah-langkah seperti restorasi lingkungan yang rusak, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, konservasi sumber daya alam, pencegahan polusi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi internasional. Departemen Pertahanan melihat keamanan lingkungan sebagai elemen penting dalam mencegah potensi konflik dan menjaga kesejahteraan, baik di tingkat nasional maupun global, dengan menjaga lingkungan tetap sehat dan lestari. Keamanan lingkungan juga mencakup berbagai nilai, yaitu prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan.

Pencemaran laut, sebagai ancaman terhadap ekosistem maritim dan sumber daya yang menopang kehidupan manusia, merupakan salah satu fokus penting dalam keamanan lingkungan. Dalam konteks kawasan Pasifik Selatan, pencemaran laut tidak hanya mengancam ekosistem lokal tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor ekonomi, mata pencaharian masyarakat pesisir, dan stabilitas politik regional.

Dalam hal ini, pendekatan kolaboratif melalui kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia menjadi contoh konkret penerapan teori keamanan lingkungan. Kedua negara bekerja sama untuk melindungi kesehatan ekosistem laut demi kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Penerapan teori ini

membantu menjelaskan bagaimana pencemaran laut berdampak langsung terhadap kesehatan, ekonomi, dan keamanan manusia, sehingga memperkuat urgensi kerja sama bilateral dalam menghadapi tantangan lingkungan lintas batas.

### **3. Teori Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance Theory)**

Pada umumnya teori ini merupakan sebuah pendekatan yang mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip baik secara kebijakan maupun praktik yang mampu mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Pendekatan ini didukung oleh Frank Biermann (2007) menyoroti pentingnya konsep *Earth System Governance* sebagai kerangka kerja global untuk mengelola tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Konsep ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam menangani masalah lingkungan, mengingat ekosistem bumi saling terhubung secara lintas batas.

Biermann menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga harus melibatkan organisasi internasional, perusahaan multinasional, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Melalui pendekatan ini, *Earth System Governance* bertujuan untuk menciptakan institusi yang adaptif, efektif, dan inklusif, yang mampu menghadapi dinamika global seperti pencemaran. Selain itu,

Biermann juga menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam tata kelola lingkungan, dengan memastikan bahwa negara berkembang memiliki akses dan kapasitas yang setara dalam menangani isu-isu lingkungan global. Konsep ini menjadi relevan dalam hubungan internasional karena menggarisbawahi perlunya kolaborasi multi-level yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik untuk menggambarkan situasi, menguraikan data, serta menyajikan fakta fakta dan argumen atau pendapat yang relevan terkait dengan “Peran Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Dalam Penanggulangan Pencemaran Laut Di Perairan Kawasan Pasifik Selatan”.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, kumpulan artikel ilmiah, dokumen, jurnal, surat kabar, dan informasi yang relevan dari internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kajian pustaka. Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peninjauan dan penelitian terhadap berbagai literatur dan sumber referensi, baik yang diperoleh secara online maupun offline.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan fakta dan data kualitatif yang kemudian diolah untuk menghasilkan gambaran Peran Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Dalam Penanggulangan Pencemaran Laut di Perairan Kawasan Pasifik Selatan”.

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode deduktif. Metode ini dimulai dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian secara umum, kemudian menarik kesimpulan khusus yang menjelaskan hasil penelitian yang terkait dengan Peran Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Dalam Penanggulangan Pencemaran Laut Di Perairan Kawasan Pasifik Selatan.

## **F. Rancangan Komposisi BAB**

**BAB 1 Pendahuluan** merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

**BAB 2 Tinjauan Pustaka** yang berisi telaah Pustaka terkait penelitian dua konsep yang digunakan dalam penelitian. Pada tinjauan Pustaka akan menjelaskan kedua konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional sehingga sejalan dengan penelitian yang digunakan. Selain itu kedua konsep akan dihubungkan dengan teori-teori yang mendasari konsep yang dipilih dalam penelitian

**BAB 3 Gambaran Umum** memberikan penjelasan secara umum mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia–Australia, permasalahan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan, serta dampak dan tantangan yang menyertainya. Bab ini juga akan menguraikan kontribusi kerja sama kedua negara dalam menangani isu pencemaran laut serta dasar-dasar hukum internasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

**BAB 4 Hasil dan Pembahasan** akan memberikan penjelasan terkait hasil penelitian dan analisis yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran kerja sama bilateral Indonesia–Australia dalam penanggulangan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan. Analisis difokuskan pada identifikasi dampak pencemaran laut terhadap kedua negara, bentuk kerja

sama yang telah dilakukan, efektivitas dari kerja sama tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

**BAB 5 Kesimpulan dan Saran** berisi rangkuman hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk Kesimpulan untuk menjawab penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan dilakukan pemaparan dengan berfokus pada tiga pembahasan utama. Pertama, penulis akan memaparkan secara spesifik tentang konsep kerja sama internasional, mencakup teori liberalisme serta peran kerja sama bilateral dan multilateral dalam mengatasi masalah lingkungan, khususnya pencemaran laut. Kedua, penulis akan menjelaskan konsep keamanan lingkungan, termasuk peran PBB dan konvensi internasional, serta kebijakan lingkungan masing-masing negara dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia. Ketiga, penulis akan mendalami teori *Environmental Governance* untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami pengelolaan lingkungan melalui kerja sama internasional. Penjelasan lebih rinci mengenai aspek-aspek tersebut akan diuraikan dalam subbab berikutnya.

#### **A. Konsep Kerja Sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan antarnegara. Menurut Holsti (2007), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Dalam konteks hubungan internasional modern, tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan global tanpa kerja sama dengan negara lain (Kusumohamidjojo, 2015).

Konsep kerja sama internasional menjadi landasan penting dalam memahami dinamika hubungan Indonesia-Australia dalam menanggulangi pencemaran laut di Perairan Kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama internasional dapat terbentuk melalui berbagai kondisi yang saling mendukung untuk mencapai kesepakatan bersama. Kerja sama internasional dianggap memiliki karakteristik tersendiri yang terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama, memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, menghormati kedaulatan masing-masing negara, didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, serta memiliki kerangka hukum yang jelas dan mengikat.

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff (1997), kerja sama internasional merupakan hubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan bersama, yang diakui secara sengaja dan dicari untuk dipenuhi melalui kerja sama satu sama lain. Dalam konteks lingkungan maritim, kerja sama internasional menjadi instrument penting mengingat karakteristik pencemaran laut yang bersifat lintas batas dan membutuhkan pendekatan kolaboratif dalam penanganannya.

Tujuan konsep kerja sama internasional sejalan dengan prinsip-prinsip penanganan pencemaran laut. Dengan memprioritaskan pendekatan kolaboratif, Indonesia dan Australia dapat secara efektif mengelola dan menangani isu-isu pencemaran lintas batas di Perairan Kawasan Pasifik Selatan. Prinsip kesetaraan dan saling menghormati

kedaulatan membantu membangun kepercayaan antara kedua negara, memungkinkan mereka untuk mengembangkan program-program penanggulangan pencemaran laut yang lebih komprehensif. Dengan demikian, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan akan mengakui efektivitas dari mekanisme kerja sama bilateral ini. Selain itu, prinsip berbagi tanggung jawab memperkuat kerja sama internasional dengan mendorong partisipasi aktif kedua negara dalam upaya perlindungan lingkungan maritim, termasuk pertukaran teknologi, informasi, dan praktik terbaik dalam penanganan pencemaran laut (Karen N. Scott 2021). Melalui pendekatan kerja sama internasional.

Dalam konteks kerja sama Indonesia-Australia dalam penanggulangan pencemaran laut di Perairan Kawasan Pasifik Selatan, teori interdependensi menjadi dasar upaya kedua negara dalam membangun kerangka kerja sama maritim untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi tantangan pencemaran lintas batas. Teori interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye (2012) dalam "Power and Interdependence" berfokus pada ketergantungan mutual antar negara dalam menangani isu-isu transnasional, termasuk masalah lingkungan maritim.

Teori ini sejalan dengan konsep "collective action" yang dikembangkan oleh Ostrom (2015) dalam "Governing the Commons", yang menekankan pentingnya kerja sama kolektif dalam mengelola sumber daya bersama seperti lingkungan laut. Dalam implementasinya,

Indonesia dan Australia mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama bilateral yang mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan koordinasi penanganan pencemaran laut.

Efektivitas kerja sama lingkungan internasional bergantung pada komitmen para pihak dan kerangka institusional yang memadai. Hal ini tercermin dalam berbagai perjanjian bilateral Indonesia-Australia yang didukung oleh struktur kelembagaan seperti komite bersama dan kelompok kerja teknis untuk implementasi program penanggulangan pencemaran laut (Mitchell 2020).

Teori interpedensi pertama dikaji oleh Keohane dan Nye dalam buku *Power and Interdependence: World Politics in Transition* menjelaskan bahwa saling ketergantungan dalam politik dunia mengacu pada situasi yang ditandai oleh dampak timbal balik antarnegara atau antaraktor di negara yang berbeda. Dalam konteks ini, kerja sama menjadi hal yang esensial untuk mengelola hubungan antarnegara yang semakin kompleks. Lebih lanjut, Keohane (1984) dalam *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* menegaskan bahwa institusi internasional berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian melalui penyediaan informasi, penegakan kepatuhan, dan fasilitasi negosiasi kesepakatan. Institusi ini membantu negara-negara dan aktor lainnya mengelola saling ketergantungan dengan lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan global yang membutuhkan koordinasi dan kepercayaan bersama.

Teori interpedensi memiliki prinsip yaitu: (a) saling ketergantungan terjadi ketika tindakan satu negara mempengaruhi negara lain; (b) Teori interdependensi melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan; (c) Institusi internasional berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi kerja sama; (d) teori ini juga membedakan antara kekuatan keras (*hard power*) dan kekuatan lunak (*soft power*); (e) Teori interdependensi menekankan bahwa hubungan internasional tidak dapat dipahami hanya melalui lensa kekuatan militer. Sebaliknya, hubungan ini melibatkan jaringan kompleks dari interaksi yang mencakup berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, dan aktor nonnegara (Keohane, 1977)

Dalam konteks interpedensi saling ketergantungan membantu memperkuat kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia yang memungkinkan kedua negara ini mampu mengatasi tantangan pencemaran laut di perairan kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama ini terwujud melalui berbagai inisiatif, seperti pengawasan perikanan ilegal dan pertukaran informasi terkait pengelolaan lingkungan laut. Melalui forum-forum bilateral dan multilateral kedua negara dapat mendiskusikan isu-isu lingkungan secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil untuk menangani masalah lingkungan yang bersifat lintas batas. Dengan demikian, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan

pencemaran laut berkontribusi pada upaya menjaga kesehatan ekosistem laut, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi tantangan global di kawasan Pasifik.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang lingkungan telah berlangsung melalui berbagai inisiatif. Contohnya adalah keterlibatan kedua negara dalam *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, dan Program program kerja sama lainnya dalam penelitian dan teknologi kelautan.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut, seperti penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), serta mitigasi dampak industri perkapalan dan pesisir. Peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan bersama menjadi elemen penting dalam memperkuat upaya ini (*Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2021*).

Dalam konteks multilateral, kedua negara juga berkontribusi pada kerangka global seperti IMO. Forum ini memungkinkan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk mengoordinasikan upaya mereka dalam menangani isu-isu lingkungan lintas batas. Barrows dan Stokke (2020) menekankan bahwa sinergi antarnegara melalui mekanisme ini sangat penting dalam mengurangi dampak pencemaran laut, terutama bagi negara berkembang.

## **B. Teori Keamanan Lingkungan**

Teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security) merupakan konsep yang berkembang pada era pasca Perang Dingin sebagai respons terhadap meluasnya definisi keamanan yang tidak lagi terbatas pada aspek militer. Menurut Barry Buzan (1998), keamanan lingkungan menjadi salah satu dari lima dimensi keamanan yang mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, ancaman terhadap keamanan lingkungan dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan manusia.

Keamanan lingkungan merujuk pada upaya untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam dari ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah (Matthew, 2013). Dalam konteks kerja sama internasional, keamanan lingkungan sering kali menjadi fokus dalam hubungan antarnegara untuk mencegah degradasi lingkungan yang dapat memicu konflik atau ketidakstabilan (Barnett & Adger, 2007). Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan merupakan contoh nyata dari upaya menjaga keamanan lingkungan melalui kolaborasi kebijakan, teknologi, dan penegakan hukum untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem laut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam menetapkan norma dan regulasi internasional untuk perlindungan lingkungan laut. Salah satu konvensi utama yang mengatur hukum

kelautan adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). UNCLOS, yang diadopsi pada tahun 1982, menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara dalam mengelola wilayah laut mereka, termasuk aspek perlindungan lingkungan dan penanggulangan pencemaran laut.

Di Kawasan Pasifik Selatan, keamanan lingkungan melibatkan interaksi kompleks antara negara-negara pesisir, organisasi regional, serta aktor global seperti Indonesia dan Australia. Negara-negara di kawasan ini berupaya menjaga kelestarian lingkungan laut dan mencegah pencemaran yang dapat mengancam ekosistem serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Indonesia dan Australia, melalui kerja sama bilateral dan forum multilateral, berperan dalam menangani pencemaran laut dengan menerapkan regulasi, teknologi pemantauan, dan kebijakan lingkungan. Upaya ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi kebijakan maritim dan kerja sama lingkungan di kawasan, serta menuntut negaranegara lain untuk turut serta dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Matthew, 2013).

Dalam konteks kawasan Pasifik Selatan, keamanan lingkungan dapat dilihat dari isu pencemaran laut yang melibatkan berbagai aktor internasional. Pencemaran ini berdampak langsung pada ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan, yang menjadi perhatian utama negara-negara di kawasan. Indonesia dan Australia, melalui berbagai inisiatif kerja sama, berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan

mendorong kebijakan maritim yang berkelanjutan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Namun, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik sering kali menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif (Matthew, 2013). Keberlanjutan kerja sama ini sangat bergantung pada koordinasi regional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan masyarakat pesisir, guna memastikan perlindungan ekosistem laut di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam keamanan lingkungan kawasan Pasifik Selatan, Indonesia dan Australia merupakan bagian dari kompleks keamanan lingkungan regional, di mana kondisi ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia serta kebijakan lingkungan internasional. Ancaman pencemaran laut, baik akibat tumpahan minyak, limbah plastik, maupun eksploitasi sumber daya berlebihan, tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga menimbulkan risiko bagi negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini menuntut adanya kerja sama dan pendekatan kolektif dalam menanggulangi pencemaran laut dan menjaga stabilitas lingkungan maritim. Melalui teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security), konsep ini dapat dijelaskan lebih mendalam dengan menyoroti bagaimana kerja sama Indonesia-Australia berkontribusi dalam mengatasi tantangan pencemaran laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut di kawasan.

Teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security) adalah pendekatan dalam studi keamanan yang menjelaskan bagaimana faktor lingkungan berpengaruh terhadap stabilitas suatu kawasan. Teori ini menekankan bahwa degradasi lingkungan, seperti pencemaran laut, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam, dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan suatu negara maupun kawasan secara keseluruhan. Selain itu, teori ini juga menyoroti bahwa keamanan lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan satu negara, tetapi memerlukan kerja sama lintas batas untuk mengatasi tantangan yang bersifat global. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Australia dalam penanggulangan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan, teori keamanan lingkungan mengakui peran aktor non-negara, seperti organisasi lingkungan dan masyarakat pesisir, serta pentingnya pendekatan kolektif dalam menjaga stabilitas ekosistem maritim (Barnett, 2001).

Teori keamanan lingkungan memberikan kerangka yang relevan untuk memahami hubungan antara pencemaran laut dan stabilitas kawasan. Barnett (2001) menekankan bahwa keamanan lingkungan mencakup keamanan ekologis, keamanan sumber daya, dan keamanan lingkungan terkait konflik, yang semuanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah ketegangan antarnegara. Pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu mata pencaharian

masyarakat pesisir, memicu perselisihan terkait eksploitasi sumber daya, dan melemahkan ekonomi berbasis kelautan. Oleh karena itu, kerja sama internasional antara Indonesia dan Australia menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di kawasan ini.

### **C. Teori Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance Theory)**

Keamanan lingkungan merupakan konsep yang semakin penting dalam kajian hubungan internasional dan studi lingkungan. Teori ini berfokus pada hubungan antara lingkungan dan keamanan, serta bagaimana kerusakan lingkungan dapat memicu konflik dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau kawasan. Dalam konteks pencemaran laut, teori keamanan lingkungan memberikan kerangka untuk memahami dampak pencemaran terhadap ekosistem, masyarakat, dan hubungan antarnegara. Keamanan lingkungan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem dari kerusakan yang dapat mengancam kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan. Menurut Homer-Dixon (1994), kerusakan lingkungan dapat menyebabkan "ketegangan sosial" yang berpotensi memicu konflik. Dalam konteks ini, pencemaran laut menjadi salah satu isu yang sangat relevan, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada ekosistem laut,

tetapi juga pada kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Lingkungan dan keamanan saling terkait dalam banyak cara. Kerusakan lingkungan, seperti pencemaran laut, dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, hilangnya sumber daya, dan meningkatnya ketidakstabilan sosial. Pencemaran laut dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi negara-negara kepulauan, terutama di kawasan Pasifik Selatan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Sebagai contoh, pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah plastik dan tumpahan minyak dapat merusak habitat laut, mengurangi populasi ikan, dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Selain itu, pencemaran dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti keracunan makanan dan penyakit yang ditularkan melalui air. Dalam konteks ini, pencemaran laut tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga isu yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Pencemaran laut, yang disebabkan oleh limbah plastik, tumpahan minyak, dan limbah kimia, merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Menurut laporan UNEP (2016), pencemaran laut dapat mengakibatkan kerusakan habitat, penurunan populasi biota laut, dan dampak negatif pada kesehatan manusia. Dalam konteks keamanan lingkungan, pencemaran laut dapat memicu konflik antarnegara, terutama ketika sumber daya laut yang terbatas menjadi

semakin terancam. Sebagai contoh, tumpahan minyak dari kapal tanker dapat merusak terumbu karang dan mengancam kehidupan laut, sementara limbah plastik dapat mengakibatkan akumulasi sampah di perairan yang mengganggu ekosistem. Dampak pencemaran ini tidak hanya dirasakan di negara asal pencemaran, tetapi juga dapat menyebar ke negara-negara tetangga melalui arus laut, menciptakan masalah lingkungan yang bersifat lintas batas.

Kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan pencemaran laut. Teori keamanan lingkungan menekankan perlunya kolaborasi antara negara-negara untuk mengatasi masalah lintas batas yang tidak mengenal batas politik. Dalam konteks Indonesia dan Australia, kerja sama maritim dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan batas laut, pengelolaan sumber daya, dan penanggulangan pencemaran. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk perjanjian bilateral, forum regional, dan organisasi internasional. Misalnya, Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengurangi pencemaran laut, serta berbagi informasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui kerja sama ini, kedua negara dapat berkontribusi pada keamanan lingkungan di kawasan Pasifik Selatan.

Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan pencemaran laut dapat dilihat sebagai contoh konkret penerapan teori

keamanan lingkungan. Sejak ditandatanganinya deklarasi kerja sama maritim pada 26 Februari 2017, kedua negara telah berkomitmen untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang mempengaruhi kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama ini mencakup upaya untuk mengurangi pencemaran laut, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya laut. Dalam konteks ini, kedua negara dapat melakukan berbagai inisiatif, seperti program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi lokal dalam menangani masalah pencemaran laut dan melindungi ekosistem laut.

Pada penelitian ini berfokus pada hubungan antara pencemaran laut, keamanan lingkungan, dan kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerja sama antara Indonesia dan Australia dapat berkontribusi pada penanggulangan pencemaran laut di kawasan Pasifik Selatan, serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan di kawasan tersebut. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa teori keamanan lingkungan memberikan kerangka yang relevan untuk memahami hubungan antara pencemaran laut dan keamanan. Pencemaran laut bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga isu yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, kerja

sama internasional, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia, menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keamanan lingkungan di kawasan Pasifik Selatan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama berasal dari hasil kerja sama antara Pusat Studi Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Indonesia (Pusjianmar Seskoal) dengan Sea Power Centre – Australia yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam publikasi berjudul *Indonesia–Australia Maritime Security: Challenges and Cooperation*. Publikasi ini merupakan kajian strategis yang membahas tantangan dan peluang kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia. Isu-isu yang diangkat meliputi pencemaran laut, penangkapan ikan ilegal, pengembangan ekonomi biru, serta kerja sama dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Dalam publikasi ini ditegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Australia sangat penting dalam menghadapi tantangan non-tradisional, khususnya pencemaran laut. Bentuk kerja sama yang didorong meliputi peningkatan kapasitas pengawasan laut, pertukaran informasi intelijen maritim, serta penegakan hukum laut yang efektif. Penelitian ini berperan penting dalam memberi konteks awal mengenai pentingnya kemitraan bilateral dalam melindungi kawasan maritim Pasifik Selatan dari berbagai ancaman lingkungan.

Penelitian kedua ditulis oleh Pangemanan dan Perwita (2022) dalam artikel berjudul *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia: Kerjasama Kemaritiman Indonesia–Australia dalam Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation 2018–2022*. Dalam artikel ini, dibahas bagaimana Plan of Action (PoA) menjadi instrumen konkret dari kerja sama bilateral Indonesia–Australia yang mencakup sektor keamanan maritim, termasuk isu pencemaran laut. Artikel ini menjelaskan bahwa PoA menjadi medium pelaksanaan kerja sama nyata dalam bidang keamanan non-tradisional, seperti perlindungan lingkungan laut, manajemen perbatasan maritim, serta penguatan kapasitas institusi kelautan. Artikel ini juga menyoroti bagaimana dinamika diplomasi pertahanan digunakan sebagai sarana memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Penelitian ini penting karena mengulas implementasi kebijakan secara langsung yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat teknis antar dua negara.

Penelitian ketiga adalah publikasi berjudul *Pacific Maritime Security Cooperation* yang diterbitkan oleh University of Adelaide. Kajian ini mengulas bentuk kerja sama keamanan maritim di kawasan Pasifik, terutama dalam menghadapi ancaman lintas batas seperti penangkapan ikan ilegal, pelanggaran wilayah laut, serta pencemaran laut. Dalam publikasi ini dijelaskan bahwa pendekatan regional dan kemitraan strategis menjadi kunci dalam membangun ketahanan maritim

kawasan, khususnya di negara-negara kepulauan kecil Pasifik yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan teknologi.

Australia, dalam hal ini, diidentifikasi sebagai salah satu mitra utama yang memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan teknis dan pendanaan bagi penguatan sistem pengawasan maritim. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana kerja sama regional berperan dalam mendukung keamanan lingkungan laut dan menempatkan kerja sama Indonesia–Australia dalam konteks kawasan yang lebih luas.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kerja sama Indonesia–Australia tidak hanya berfokus pada keamanan tradisional, tetapi juga merambah ke sektor keamanan non-tradisional seperti pencemaran laut. Kajian-kajian tersebut menjadi dasar penting dalam memahami bentuk kerja sama konkret, tantangan, dan prospek penguatan kolaborasi kedua negara di kawasan Pasifik Selatan.